

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Proses globalisasi bukan hanya berkenaan dengan masalah bisnis dan masalah pasar bebas AFTA 2003 serta APEC 2020. Akan tetapi, proses perubahan dalam era globalisasi berkenaan pula dengan nilai kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Proses ini didukung oleh kemajuan transportasi dan komunikasi moderen apa yang dikenal dewasa ini sebagai era “*cybernetic*” yang melahirkan “*cybernation, cybersociety, and information superhighway*”, yang telah menyatukan umat manusia di dalam satu kesatuan, tetapi yang diakui bertemu dengan berbagai konsekwensinya. Dunia dewasa ini sedang mengalami proses transformasi sosial politik dan ekonomi yang saling kait mengait. Para ahli mengatakan dewasa ini sedang terjadi suatu proses pembentukan “*global village*”. Ada yang mengatakan bahwa dunia telah menjadi dunia tanpa batas, “*borderless world*”, meredupnya “*nation state*”, dan berbagai macam ungkapan seperti: “*placeless society*” dan sebagainya (Tilaar, 1998:313).

Sementara itu, dalam dekade terakhir ini banyak terdengar ketidakpuasan masyarakat pada sistem pendidikan. Rendahnya daya saing tenaga kerja Indonesia merupakan salah satu indikator yang menunjukkan kurangnya daya adaptasi pendidikan terhadap tuntutan lingkungan yang berubah sangat cepat dalam struktur ekonomi dunia yang menyatu. Implikasi pasar bebas bagi

pendidikan adalah tuntutan untuk mampu bertahan dan beradaptasi dalam lingkungan pembelajaran tanpa batas (Peniwati, 1998:1).

Praktek-praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) yang terjadi di banyak komponen dan lapisan masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor utama, termasuk di antaranya kegagalan proses pendidikan di Indonesia. Dalam hal ini, proses pendidikan nasional secara menyeluruh belum mampu membentuk manusia Indonesia yang bermoral tinggi, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk membentuk masyarakat yang menghargai prestasi (*achieving society*). Proses pendidikan nasional secara menyeluruh belum mampu mengantar masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang senang belajar. Proses pendidikan hanya diarahkan untuk menyiapkan tenaga kerja yang siap pakai dalam artian yang sempit dan tidak berkembang. Kondisi ini yang membuat Bangsa Indonesia belum mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain yang telah maju dan belum mampu mengantisipasi masalah-masalah yang menghadang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Sudarsono, 1998:1-2)

Pendidikan merupakan wahana bagi pengembangan wawasan kebangsaan. Pada masa kebangkitan nasional, pendidikan nasional menyatu dengan gerakan kebangsaan. Ketika pemerintah kolonial mulai menindas gerakan kebangsaan, pendidikan merupakan wahana paling ampuh untuk menyalurkan cita-cita para pejuang kemerdekaan. Sedangkan pemimpin dan peletak dasar pendidikan nasional antara lain adalah Ki Hadjar Dewantara,

dengan Taman Siswa, dan Moh. Syafei dengan INS Kayutanam dan lain-lainnya (Tilaar, 1995:3).

Visi Bangsa Indonesia yang didasarkan atas Tap MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju, dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi serta berdisiplin. Selanjutnya arah kebijakan pendidikan yang didasarkan atas Bab IV butir E. 7 GBHN 1999 yaitu mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu, dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen bangsa Indonesia agar generasi muda dapat berkembang secara optimal disertai dengan hak dukungan dan lindungan yang sesuai dengan potensinya. Selanjutnya tujuan pendidikan nasional dikemukakan oleh Komaruddin (1997:55) untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, beretos kerja, profesional, bertanggung jawab, produktif, serta sehat jasmani dan rohani.

Berkaitan dengan visi, misi, dan tujuan pendidikan tersebut di atas, ada beberapa pandangan tentang hakekat pendidikan yang dikemukakan oleh Makmun (1999:7) sebagai berikut: (1) secara fenomenologis (*Langevel*),

pendidikan pada hakekatnya merupakan suatu bantuan yang diberikan seseorang kepada orang lain yang sedang berusaha untuk mencapai kedewasaannya dengan menggunakan cara tertentu serta berlangsung dalam lingkungan (keluarga, sekolah, dan masyarakat) sosio kultural tertentu, (2) secara legalistik (UUSPN No.2/1999), pendidikan merupakan usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan/atau latihan bagi perannya di masa yang akan datang, dan (3) secara sistemik, pendidikan merupakan proses transaksional dari totalitas perangkat masukan (*raw, instrumental, and environmental inputs*) untuk menghasilkan keluaran (*observed outputs*) sesuai dengan yang diharapkan (*minimum acceptable performances, intended outputs*). Soedijarto (1998:7) juga mengemukakan tentang hakekat dari proses pendidikan adalah proses perubahan manusia dalam tingkah lakunya seperti: cara dan kemampuan berpikir, sikap, nilai, dan kemampuan kerja.

Dewasa ini berbagai isu politik yang berkembang di Indonesia antara lain: reformasi, demokrasi, otonomi daerah serta desentralisasi, dan pada saat ini telah mulai memasuki otonomi pendidikan. Pilihan praktisi pendidikan adalah isu desentralisasi pendidikan yang akan diwujudkan dengan telah ditetapkannya dasar hukum dan peraturan perundangan bagi pelaksanaan desentralisasi pendidikan tersebut.

Sedangkan dasar hukum desentralisasi pendidikan merujuk pada pasal 18 UUD 1945 yang merupakan landasan konstitusional untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang

luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah. Hal ini dijabarkan dengan ketetapan MPR RI Nomor: XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah: pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tap MPR tersebut selanjutnya dijabarkan dengan UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta PP RI No. 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom..

Berdasarkan pasal 11 ayat (2) UU No. 22 Tahun 1999 ditetapkan bahwa bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan kota meliputi: pekerjaan umum, kesehatan, *pendidikan dan kebudayaan*, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja. Tap MPR RI dan Undang-Undang serta peraturan pemerintah tersebut di atas dapat dijadikan sebagai landasan yuridis dalam pelaksanaan otonomi pendidikan, dan otonomi sekolah.

Untuk mewujudkan otonomi pendidikan, paradigma baru dalam pengelolaan otonomi pendidikan dikemukakan oleh Satori (1999:15) sebagai berikut: (1) mendorong memberdayakan masyarakat, (2) menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, (3) meningkatkan peran serta masyarakat, dan (4) mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Namun demikian, upaya tersebut hendaknya diharapkan adalah (1) tidak mengorbankan kepentingan nasional, (2) mutu pendidikan, (3) efisiensi pengelolaan, (4) pemerataan, dan (5)



akuntabilitas pendidikan, (1) efektivitas, (2) efisiensi, dan (3) kepercayaan masyarakat.

Selanjutnya paradigma baru pengelolaan otonomi pendidikan yang dikemukakan oleh Nurhadi, (dalam Satori 1999:15-19) berikut ini.

1. Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan daerah kabupaten/kota, tetapi perlu adanya organisasi pengelola pendidikan pada pemerintah pusat untuk menetapkan visi dan misi nasional, perencanaan, pengendalian, dan monitoring secara makro, menetapkan skala prioritas nasional. Organisasi ini bertanggung jawab mengamankan misi pendidikan yang menyangkut kepentingan nasional.
2. Hubungan antara pemerintah pusat, daerah propinsi, dan daerah kabupaten/kota tidak bersifat hirarkhis, tetapi bersifat fungsional, konsultatif, kemitraan, dan koordinatif dalam pengambilan keputusan serta mengatur kemitraan dalam pelaksanaannya. Untuk mendukung pola hubungan yang demikian dan menampung aspirasi masyarakat, perlu dikembangkan jenis organisasi non-struktural, fungsional, dan organik (*semacam corporate organization*). Akuntabilitas dan efisiensi jenis organisasi tersebut, perlu didukung oleh personil yang profesional dalam bidangnya.
3. Pembagian kewenangan dalam organisasi tidak didasarkan atas hirarki vertikal, tetapi didasarkan atas kelompok spesialisasi berdasarkan kemampuan profesional yang diperlukan. Dengan sistem ini dapat dihindari tumpang tindih kewenangan dan mendorong berkembangnya

profesionalisme, serta meningkatkan efisiensi. Selain itu, jenis organisasi non-struktural yang semi permanen dalam bentuk komite, dewan, dan majelis perlu dikembangkan sebagai forum untuk mengambil keputusan bersama antara wakil pemerintah, masyarakat, dan orang tua peserta didik sebagai pihak-pihak yang secara langsung berkepentingan dengan pendidikan (*stakeholders*).

4. Beberapa pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan yang mahal dan strategis dapat direncanakan dan didayagunakan atas koordinasi daerah propinsi agar dapat dilakukan pemanfaatan bersama dengan prinsip "*resources sharing*" seperti pusat sumber belajar di sekolah dalam bentuk gugus.
5. Menjaga konsistensi benang merah antara visi, misi, dan prioritas nasional, dengan implementasinya pada satuan pendidikan, tanpa mengurangi keleluasaan daerah untuk mengembangkan kreativitasnya. Perlu adanya pembagian tugas perencanaan dalam berbagai tingkatan seperti: (1) pemerintah pusat bertugas membuat perencanaan tingkat makro yang membuat rumusan pokok, (2) pemerintah daerah propinsi menjabarkan rumusan pokok menjadi program, (3) pemerintah daerah kabupaten/kota menjabarkan program dalam bentuk perencanaan kegiatan, dan (4) pada tingkat sekolah merumuskan penyelenggaraan operasional. Untuk memperoleh komitmen dalam implementasi setiap tingkat rumusan perencanaan perlu dilakukan secara kemitraan dengan pihak-pihak yang berkepentingan.

6. Dalam bidang pengelolaan anggaran dimana (1) pemerintah pusat mempunyai tugas dan kewenangan untuk memperjuangkan proporsi anggaran pendidikan dari seluruh anggaran nasional serta menetapkan alokasi perjenjang dan jenis pendidikan yang sesuai dengan skala prioritas nasional, (2) pemerintah daerah propinsi mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menjaga agar alokasi minimal anggaran untuk pendidikan sebagai instrumen utama meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dapat diamankan dalam persaingannya dengan kepentingan sektor lain, (3) pemerintah daerah kabupaten/kota bertugas dan berkewenangan menjabarkan perencanaan alokasi anggaran yang lebih operasional, dan (4) pada tingkat satuan penyelenggaraan pendidikan untuk menyusun anggaran secara mandiri. Penilaian kelayakan perencanaan sekolah dan pembiayaannya itu dilakukan oleh dewan sekolah dengan bantuan konsultan dari kantor kabupaten/kota.
7. Pengendalian terhadap akuntabilitas pelaksanaan layanan dan kinerja organisasi pendidikan dan kebudayaan dilakukan secara internal oleh setiap satuan organisasi pengelola atau satuan pendidikan yang bersangkutan (*self assessment/internal monitoring*), dan secara eksternal oleh organisasi lain (*external monitoring/evaluation*). Instrumen internal monitoring sebaiknya dikembangkan sendiri oleh unit organisasi masing-masing. Sedangkan instrumen monitoring/evaluasi eksternal dikembangkan oleh pemerintah pusat.



8. Dalam penyusunan kurikulum harus memperhatikan kepentingan nasional dan memberikan peluang dalam kontekstual kepentingan daerah. Pemerintah pusat menetapkan visi, misi pendidikan, dan kualitas minimal (*minimum basic competencies*) untuk setiap jenjang pendidikan dengan indikator keberhasilan yang jelas (*key result areas*). Kemudian daerah kabupaten/kota menterjemahkan kurikulum itu (*curriculum profile*) ke dalam visi, misi, tujuan, dan pokok-pokok bahasan utama yang diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan dengan mengakomodasi tuntutan kontekstual kewilayahan. Pada tingkat satuan penyelenggaraan pendidikan memiliki wewenang untuk mengembangkan pokok-pokok bahasan yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan (*program priority*) masing-masing. Kewenangan profesional guru adalah menterjemahkan program kurikulum kelembagaan ke dalam perencanaan mengajarnya. Penetapan buku pelajaran dan peralatan pendidikan lainnya untuk mendukung pelaksanaan kurikulum menjadi kewenangan pada tingkat penyelenggaraan satuan pendidikan atau kewenangan pada daerah kabupaten/kota.

Selanjutnya hasil penelitian Mahdiansyah dkk. (1999:31) mengemukakan pola manajemen dalam desentralisasi pendidikan didasarkan pada: (1) sumber daya manusia yang berkualitas, (2) manajemen tidak harus seragam, tetapi disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah (*local based*), (3) mengutamakan efisiensi dan efektifitas, (4) tanggung jawab tertuju pada pemerintah dan masyarakat, (5) diperlukan manajemen yang transparan, (6) peningkatan eselonisasi, (7) penghilangan ego-sektoral, (8) pemanfaatan sarana

dan prasarana secara optimal, dan (9) pemanfaatan dana dan sumber daya lebih luwes.

Berdasarkan landasan yuridis dan paradigma pengelolaan otonomi pendidikan tersebut, tampak bahwa pelaksana desentralisasi pendidikan adalah pemerintah daerah kabupaten/kota. Untuk melaksanakan desentralisasi pendidikan terdiri dari berbagai model yaitu: (1) otonomi perguruan tinggi, (2) manajemen berbasis sekolah, dan (3) pendidikan berbasis masyarakat. Sedangkan Silverius (1999:70) menekankan perlunya desentralisasi di tingkat kelas dengan ciri-ciri antara lain sebagai berikut: (1) guru dan siswa saling mengajar dan saling belajar, (2) guru dan siswa saling berpikir dan memikirkan, (3) guru dan siswa saling berbicara dan mendengarkan, (4) guru dan siswa saling mengatur dan diatur, dan (5) guru dan siswa bersama-sama memilih dari sekian banyak alternatif yang perlu dilaksanakan bersama untuk perwujudan pendidikan di kelasnya pada khususnya dan di sekolah pada umumnya.

Berkenaan dengan institusi sekolah, Soedijarto (1998:97-98) mengemukakan bahwa sekolah berperan dalam mengembangkan sikap kerja keras, disiplin, motivasi untuk berprestasi yang tinggi, sikap kompetitif, dapat dengan mudah menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan masyarakat, kreatif, ingin belajar sesuatu yang baru. Manajer sekolah harus dapat membuat kelas sebagai sistem sosial yang dapat menjadikan belajar sebagai media untuk mensosialisasikan nilai-nilai, sikap, dan kemampuan.



Sejalan dengan pemikiran Soedijarto tersebut di atas, Anwar (1990:10) mengemukakan bahwa asumsi yang digunakan adalah manusia sebagai makhluk yang dapat dididik (*animal educandum*), makhluk yang dapat mendidik (*animal educabil*) dan makhluk yang tertuju kepada pendidikan (*normatif*). Asumsi ini lahir menurut pandangan *antropologi centra* yang menempatkan manusia sebagai makhluk individu, makhluk sosial, dan makhluk etika.

Salah satu model dalam desentralisasi pendidikan adalah manajemen berbasis sekolah (MBS). Pengertian MBS ini dikemukakan oleh Rumtini dan Jiyono (1999:81) yaitu MBS merupakan bentuk alternatif sekolah dalam program desentralisasi pendidikan, yang ditandai dengan adanya otonomi yang luas di tingkat sekolah, partisipasi masyarakat yang tinggi, dan dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional.

Selanjutnya Supriadi dan Jalal (2001:160) mengemukakan MBS merupakan bentuk alternatif sekolah sebagai hasil dari desentralisasi dalam bidang pendidikan. MBS pada prinsipnya bertumpu pada sekolah dan masyarakat serta jauh dari birokrasi yang sentralistik. MBS berpotensi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, pemerataan, efisiensi, serta manajemen yang bertumpu di tingkat sekolah. Model MBS ini dimaksudkan untuk menjamin semakin rendahnya kontrol pemerintah pusat, dan dipihak lain semakin meningkatnya otonomi sekolah untuk menentukan sendiri apa yang perlu diajarkan dan mengelola sumber daya yang ada untuk berinovasi.

Lebih jauh Supriadi dan Jalal (2001:161) mengemukakan bahwa dalam model MBS, kepala sekolah dan guru memiliki kebebasan yang luas dalam mengelola sekolah tanpa mengabaikan kebijakan dan prioritas pemerintah. Lingkup strategi yang dapat ditawarkan adalah: (1) kurikulum yang bersifat inklusif, (2) proses belajar dan mengajar yang efektif, (3) lingkungan sekolah yang mendukung, (4) sumber daya yang berasas pemerataan, dan (5) standarisasi dalam hal-hal tertentu, monitoring, evaluasi, dan tes. Kelima strategi tersebut harus menyatu ke dalam empat lingkup fungsi pengelolaan sekolah, yaitu: (a) manajemen/organisasi/kepemimpinan, (b) proses belajar-mengajar, (c) sumber daya manusia, dan (d) administrasi sekolah.

Sedangkan Wahab (2001:20) mengemukakan dalam Pengelolaan Berbasis Sekolah (PBS) ada beberapa faktor yang harus diperhatikan yaitu (1) kewajiban sekolah dalam pelaksanaan PBS harus disertai adanya monitoring dan tuntutan pertanggungjawaban yang tinggi, dan menjamin bahwa sekolah menyeimbangkan antara hak-hak otonomi dengan kewajiban melaksanakan kebijakan pemerintah, serta memenuhi harapan masyarakat sekolah, (2) kebijakan dan prioritas pemerintah secara nasional tetap menjadi perhatian otonomi sekolah, namun tuntutan kebutuhan sekolah dan lingkungan tetap menjadi pertimbangan utamanya, khususnya efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan, (3) partisipasi orang tua dan masyarakat merupakan aspek penting dalam PBS, khususnya mereka berperan dalam *school council*, di mana mereka dapat berpartisipasi dalam pembuatan keputusan untuk sekolah, (4) PBS menuntut perubahan perilaku kepala sekolah, guru, dan pihak lainnya secara

profesional dalam lingkungan sekolah untuk mengoperasikan sekolah, dan (5) PBS menuntut memberikan layanan pendidikan yang komprehensif dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat sekolah setempat sebagai salah satu ciri pelaksanaannya.

Ada beberapa istilah yang berkaitan dengan manajemen berbasis sekolah yaitu: *school based management (SBM)* dan *school based decision making and management*. Konsep dasar MBS adalah mengalihkan pengambilan keputusan dari pusat/kanwil/kandep ke level sekolah (Samani, 1999:6). Dengan adanya pengalihan kewenangan pengambilan keputusan ke level sekolah, maka sekolah diharapkan lebih mandiri dan mampu menentukan arah pengembangan yang sesuai dengan kondisi dan tuntutan lingkungan masyarakatnya.

Model MBS adalah salah satu bentuk alternatif program desentralisasi dalam bidang pendidikan. Dalam rangka perwujudan reformasi pendidikan, MBS pada prinsipnya memperoleh pendelegasian kewenangan yang bertumpu pada sekolah dan masyarakat serta menjauhi birokrasi yang bersifat sentralistik. Model ini ditandai adanya otonomi yang luas di tingkat sekolah dan partisipasi masyarakat yang tinggi. Sekolah memiliki keleluasaan mengelola sumber daya dengan mengaplikasikannya sesuai prioritas kebutuhan serta sekolah lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat. Masyarakat dituntut partisipasinya agar mereka lebih memahami pendidikan, membantu, serta mengontrol pengelolaan pendidikan. Kebijakan pendidikan nasional yang menjadi prioritas pemerintah harus pula dilakukan oleh sekolah. Dalam MBS,

sekolah dituntut memiliki akuntabilitas terhadap orang tua siswa, masyarakat, dan pemerintah sebagai pelanggan.

Selanjutnya Mohrman dan Wohlstetter(1994:16-17) mengemukakan pengertian MBS sebagai berikut:

“Through SBM, teachers and other stakeholders theoretically have mechanism to become influential in redesigning their school and introducing innovative approaches to teaching and learning. ...SBM moves resources and the decisions about trade-off to the school level, where they can be tailored to the needs of the particular students being served. In this sense, SBM has been depicted as a way to bring decision making closer to individual school communities, so that education can be more responsive to local needs. ...is to improve the performance of schools in delivering value to society.

Manajemen berbasis lokasi (*site based management*) adalah untuk meningkatkan otonomi sekolah dan memberikan kesempatan kepada guru-guru, orang tua, siswa, dan anggota masyarakat dalam pembuatan keputusan, (Huda, 1999:16).

Ada beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan Manajemen Berbasis Sekolah antara lain sebagai berikut. *Pertama*, hasil penelitian Makmun dkk. (1998:269) menunjukkan bahwa pembenahan program dan peningkatan kinerja personal untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sekolah dapat dipikirkan prioritas dengan azas manfaat dan kebutuhan yang urgen dalam penyelenggaraan sekolah dikaitkan dengan kebutuhan *stakeholder*. Pengembangan manajemen dan perencanaan sekolah yang akan dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sekolah yang lebih akurat perlu mempelajari masalah kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dapat dideteksi dari deskripsi yang telah dilakukan.

Kedua, hasil penelitian Arikunto (1999:5) mengemukakan bahwa manajemen di tingkat sekolah, sudah dicoba dan digalakkan dalam bentuk “Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)” yang telah diuji cobakan di propinsi Lampung, sekolah mempunyai kewenangan penuh untuk menentukan beberapa kebijakan, dengan dukungan masyarakat setempat, namun untuk beberapa hal masih mengikuti aturan yang diberikan oleh Kakanwil setempat, serta rambu-rambu yang berlaku secara nasional. Oleh karena itu, beberapa kendala dalam pelaksanaan MBS adalah sebagai berikut: (1) kurangnya kepercayaan diri para kepala sekolah, guru-guru, dan masyarakat atas wewenang yang diberikan, sehingga setiap melangkah ingin berkonsultasi, (2) kurangnya pengetahuan dalam menyusun rencana kerja, karena tidak bisa melakukan, dan (3) ada beberapa sekolah yang sangat berlebihan mengartikan wewenang, sehingga melakukan hal-hal yang terburu nafsu.

Ketiga, hasil penelitian Somantri (1999:331) bahwa peningkatan mutu akan lebih bermakna, apabila dilakukan secara mandiri oleh masing-masing sekolah (*School Based Quality Management*), karena warga sekolah yang bersangkutan yang lebih tahu apa-apa yang harus diperbaiki dan ditingkatkannya. Kepala sekolah merupakan faktor kunci keberhasilan dalam peningkatan mutu pendidikan pada tataran sekolahnya, sedangkan Kakandep beserta perangkatnya berperan sebagai fasilitator dan dinamisator bagi sekolah-sekolah yang ada di wilayahnya. Selanjutnya Satori (1999:27) mengemukakan bahwa kewenangan profesional guru adalah menterjemahkan program

kurikulum kelembagaan ke dalam perencanaan mengajarnya. Gagasan ini sejalan dengan pengembangan MBS.

Keempat, hasil penelitian Makmun dkk. (1999:6) tentang strategi sistem perencanaan dan manajemen berbasis sekolah sebagai berikut: (1) *make sure the administrator and decision maker*, (2) *prepare appropriate written document*, (3) *train school head master and senior staffs*, (4) *introduce the innovative ideas to school people*, (5) *introduce the ideas to community key leaders*, (6) *analyze the position of the existing objective conditions*, (7) *choose strategic issues*, (8) *determine priorities*, (9) *apply the innovation*, and (10) *evaluate progressively the innovation*. Selanjutnya Makmun (1999:15) mengemukakan bahwa penerapan manajemen partisipatif adalah dalam rangka pemberdayaan sistem perencanaan dan manajemen berbasis sekolah dengan minimal memiliki tiga macam pra-kondisi yaitu: (1) gaya kepemimpinan yang dianut harus bersifat demokratis, berjiwa lugas dan terbuka, (2) budaya dan lingkungan (iklim) keorganisasian yang sehat, sehingga setiap anggotanya dapat mengekspresikan pandangan dan pendiriannya secara lugas, dan (3) menjunjung tinggi prinsip profesionalisme di lingkungan kerja yang bersangkutan.

Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab mungkin akan berbeda antara satu sekolah dengan sekolah lainnya dalam MBS. Untuk itu, MBS menawarkan kebebasan yang besar pada sekolah, dan disertai tanggung jawab dan akuntabilitas yang intensitasnya tinggi terhadap terjaminnya mutu,

partisipasi masyarakat, pemerataan, efektifitas, dan manajemen yang bertumpu dalam tim.

Dalam jangka panjang MBS akan mendorong tumbuhnya ciri-ciri khusus sekolah sesuai dengan potensi daerah setempat. Di daerah yang memiliki potensi kesenian sangat mungkin akan muncul sekolah yang memiliki keunggulan di bidang kesenian. Sekolah lain mungkin akan muncul dengan ciri khas bidang matematika, agama, olah raga dan sebagainya. Dalam jangka panjang keunggulan yang bervariasi ini akan menjadi awal kebanggaan warga sekolah dan masyarakat sekitarnya. Dalam MBS sekolah harus diberi ruang gerak yang cukup dalam menjabarkan kurikulum. Dengan cara ini, setiap sekolah memiliki peluang untuk menjadi sekolah unggul sesuai dengan potensi yang dimilikinya. MBS akan merupakan wahana penumbuhan "*school based development*" (SBD), artinya pengembangan sekolah yang didasarkan atas potensi yang dimiliki. Dengan pemikiran ini setiap sekolah memiliki potensi menjadi sekolah unggul, asal mampu mendayagunakan keunggulan-keunggulan yang ada dalam lingkungannya.

SBM sebagai salah satu inovasi pendidikan dapat dimanfaatkan untuk revitalisasi INS. Ruang Pendidik INS Kayutanam yang didirikan oleh Moh. Syafei pada tanggal 31 Oktober 1926 di Kayutanam Sumatera Barat, merupakan salah satu perguruan nasional yang telah menjadi aset bangsa. Perguruan ini hadir berdasarkan ideologi yang strategis demi pembebasan bangsa dari ketergantungan akibat lamanya terjajah (Arifin, dalam Navis, 1996:vii). Untuk menguji relevan tidaknya sistem pendidikan INS pada masa

kini dan masa datang, INS Kayutanam telah memprakarsai suatu seminar dengan tema “Strategi Pendidikan Nasional” di Jakarta tanggal 31 Mei 1995. Kesimpulannya adalah bahwa filsafat dan sistem pendidikan INS masih relevan untuk diteruskan. Selain itu, Navis (1996:102) mengemukakan bahwa sistem pendidikan INS berangkat dari pemikiran filsafat alam sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Alam bergerak dalam sistem yang tetap secara dinamis yang dialektik seimbang. Manusia sebagai substansi alam, dengan tenaga, pikiran dan perasaannya tidak boleh tidak harus mengikuti sistem alam itu. Keluar dari sistem berarti lepas dari keseimbangan.

Selanjutnya Hamid, (dalam Navis, 1996:242-245) mengemukakan bahwa Ruang pendidik INS Kayutanam menanamkan kepada siswa-siswanya hal-hal sebagai berikut: (1) kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Pencipta, (2) kemampuan untuk mengembangkan bakat, (3) percaya pada diri sendiri, (4) berakhlak, (5) bertanggung jawab atas keselamatan nusa dan bangsa, (6) berwatak aktif, (7) mempunyai daya cipta, (8) cerdas, logis, dan rasional, (8) berperasaan tajam dan kritis, (9) gigih atau ulet, (10) ketekunan berusaha, (11) percaya diri, (12) kejujuran, (13) sikap hidup pancasilais.

Sedangkan metoda mengajar yang dilakukan oleh Moh. Syafei adalah aktif kreatif, di mana siswa sebagai subyek, guru sebagai obyek, dengan istilah sekarang *student centered*. Oleh karena itu, pekerjaan guru tidak mudah sebab menghadapi pribadi siswa yang beraneka ragam. Dalam mata pelajaran keterampilan, titik beratnya bukan pada hasil yang dibuat, melainkan pada proses membuat barang dan semua pelajaran adalah alat untuk

mengembangkan keterampilan otak. Strategi dan program pendidikan INS yaitu metode yang mampu mengembangkan potensi siswa sebagai manusia merdeka, mandiri, berprestasi, aktif, kreatif dan produktif (Navis, 1996:100 dan 247).

Berdasarkan filsafat dan tujuan pendidikan itu, Ruang Pendidik INS Kayutanam terdiri atas empat kelompok yaitu: (1) pendidikan akademik, melalui ruangan untuk kecerdasan otak, (2) pendidikan keterampilan, melalui bengkel keterampilan untuk memiliki etos kerja, (3) pendidikan kerohanian, melalui asrama untuk pembinaan mental, dan (4) pendidikan kesiswaan, melalui sanggar seni dan lapangan olah raga (Navis, 1999:108).

Proses belajar dan mengajar pada Ruang Pendidik INS Kayutanam dilaksanakan pada: (1) pagi hari, siswa belajar di ruang kelas, (2) diwaktu sore siswa belajar di bengkel kerja atau seni atau olah raga, (3) malam, siswa mengikuti pelajaran yang sesuai dengan bakat masing-masing atau kursus intensif di bidang pelajaran akademik, (4) pada hari tertentu siswa bekerja di lapangan, bergotong royong atau membersihkan halaman atau gedung dan peralatan sekolah, dan (5) sekali sebulan siswa bergotong-royong bagi kepentingan lingkungan masyarakat agar mereka tetap merasa sebagai warga masyarakat. Sedangkan penjadwalan kurikulum non-akademik sangat penting dengan mempertimbangkan kondisi akademik dan kejenuhan siswa (Navis, 1996:109).

Tujuan Ruang Pendidik INS Kayutanam adalah menjadikan manusia Indonesia yang memiliki sikap sebagai berikut: (1) sifat kemanusiaan setinggi

mungkin, (2) aktivitas yang besar, (3) kecakapan dalam meniru asli dan meniru bebas, (4) kecakapan untuk mencipta sesuatu yang baru, (5) rasa tanggung jawab terhadap keselamatan negara dan bangsa serta kemanusiaan, (6) keyakinan demokrasi dalam hak dan kewajiban, (7) jasmani yang sehat dan kuat, (8) keuletan yang besar, (9) ketajaman berpikir serta logis, dan (10) perasaan peka yang halus. (Tilaar, 1999:133 dan Navis 1996:215).

Hamid, (dalam Navis, 1996:239) mengemukakan bahwa (1) belum ada suatu penelitian ilmiah yang mendalam tentang sistem INS Kayutanam oleh para ahli, dan (2) keadaan Ruang Pendidik INS Kayutanam belum mampu memperlihatkan prestasi seperti yang pernah dicapai pada tahun 1926 hingga tahun 1945 di bawah kepemimpinan Moh. Syafei. Di samping hal tersebut di atas, Tilaar (1999:133) mengemukakan bahwa Moh. Syafei dan Ki Hadjar Dewantara merupakan dua tokoh peletak dasar pendidikan nasional, akan tetapi sampai saat ini INS Kayutanam belum berkembang secara nasional, bahkan di kampusnya sendiri di Kayutanam INS juga belum berkembang dengan baik. Pada hal menurut fakta sejarah, Ruang Pendidik INS Kayutanam telah didirikan semenjak tanggal 31 Oktober 1926.

Pada saat ini Ruang Pendidik INS Kayutanam masih dianggap sebagai salah satu tonggak sejarah pendidikan nasional, terutama bila ditinjau dari konsep dasar filosofis, metoda aktif-kreatif, dan proses pembelajaran dalam mewujudkan cita-cita pendidikannya yaitu mendidik siswanya menjadi dinamis, aktif, kreatif dan produktif masih dianggap relevan dan mampu menjawab tantangan zaman. Agar INS Kayutanam tetap mengakar pada

kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman, maka INS Kayutanam perlu melakukan revitalisasi tanpa harus meninggalkan filosofi INS yang didirikan oleh Moh. Syafei.

Ruang Pendidik INS Kayutanam didasarkan atas falsafah alam sebagai ciptaan Tuhan yang bergerak dalam sistem yang tetap secara dinamis dan seimbang. Manusia sebagai substansi alam harus mengikuti sistem ini, dengan keseimbangan perkembangan otak, jiwa, dan raga. Selanjutnya Moh. Syafei mengemukakan bahwa jangan mengharapkan buah mangga dari pohon rambutan, tetapi buatlah agar setiap pohon menghasilkan buah yang manis. Artinya, pembinaan setiap siswa tidak perlu disamakan, tetapi biarkanlah mereka sesuai dengan bakat, minat, dan potensinya masing-masing. Ruang Pendidik INS Kayutanam menghasilkan siswa-siswanya yang memiliki etos kerja dan sikap mandiri, menjadi manusia berkemauan kerja keras, bermental ulet dan tekun. Pada saat ini bangsa Indonesia membutuhkan manusia dinamis, aktif kreatif, produktif dengan memiliki etos kerja yang tinggi. Akan tetapi, kenyataan pada saat ini Ruang Pendidik INS Kayutanam belum berkembang dengan baik. INS belum dikelola secara demokratis, transparan, profesional, dan akuntabel. Di samping itu, kepala sekolah dan guru kurang profesional, dan mereka kurang menguasai filsafat INS dan metoda pembelajaran aktif-kreatif. Untuk itu, INS perlu direvitalisasi.

Berdasarkan latar belakang dan mengingat masih relevan filsafat, tujuan, dan metoda pendidikan INS pada saat ini serta mengaplikasikan suatu pengelolaan sekolah yaitu MBS, perlu dilaksanakan suatu



penelitian tentang *“revitalisasi sistem pendidikan INS dengan memanfaatkan model manajemen berbasis sekolah dalam pengembangan siswa yang mandiri, studi kasus pada Ruang Pendidik INS Kayutanam di Sumatera Barat.”*

B. FOKUS MASALAH DAN PERTANYAAN PENELITIAN

Sesuai dengan latar belakang, fokus masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. *Bagaimana revitalisasi sistem pendidikan INS Kayutanam dengan memanfaatkan model manajemen berbasis sekolah dalam pengembangan siswa yang mandiri pada Ruang Pendidik INS Kayutanam di Sumatera Barat?*

Berdasarkan fokus masalah penelitian tersebut di atas, selanjutnya dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana profil Ruang Pendidik INS Kayutanam dalam pengembangan siswa yang mandiri?
2. Nilai-nilai luhur mana yang dikembangkan Moh. Syafei pada Ruang Pendidik INS Kayutanam?
3. Mengapa nilai-nilai luhur tersebut perlu dipertahankan dan dikembangkan pada Ruang Pendidik INS Kayutanam?
4. Mengapa nilai-nilai luhur tersebut belum berkembang secara optimal pada Ruang Pendidik INS Kayutanam, bila dianalisis dengan manajemen berbasis sekolah serta dianalisis dengan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan?

5. Bagaimana model konseptual revitalisasi sistem pendidikan INS Kayutanam dengan memanfaatkan model manajemen berbasis sekolah dalam pengembangan siswa yang mandiri?.

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini adalah revitalisasi sistem pendidikan INS Kayutanam dengan memanfaatkan model manajemen berbasis sekolah dalam pengembangan siswa yang mandiri pada ruang pendidik INS Kayutanam di Sumatera Barat.

2. Tujuan Khusus

Secara khusus penelitian pada Ruang Pendidik INS Kayutanam ini bertujuan sebagai berikut.

- a. Mendeskripsikan dan menganalisis profil Ruang Pendidik INS Kayutanam dalam pengembangan siswa yang mandiri.
- b. Mendeskripsikan dan menganalisis nilai-nilai luhur yang dikembangkan oleh Moh. Syafei pada Ruang Pendidik INS Kayutanam.
- c. Mendeskripsikan dan menganalisis alasan perlunya nilai-nilai luhur tersebut dipertahankan dan dikembangkan pada Ruang Pendidik INS Kayutanam.
- d. Mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor penyebab belum berkembangnya nilai-nilai luhur tersebut secara optimal pada Ruang

Pendidik INS Kayutanam, dan dianalisis dengan manajemen berbasis sekolah serta dianalisis dengan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman.

- e. Mendeskripsikan dan menganalisis revitalisasi Ruang Pendidik INS Kayutanam dengan memanfaatkan model manajemen berbasis sekolah dalam pengembangan siswa yang mandiri.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat hasil penelitian ini diharapkan dapat menyentuh dua bentuk sumbangan, yaitu sumbangan teoretis dan sumbangan praktis

1. Sumbangan Teoretis

Sumbangan teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan konseptual berupa beberapa dalil atau prinsip untuk revitalisasi Ruang Pendidik INS Kayutanam dengan memanfaatkan model manajemen berbasis sekolah dalam pengembangan siswa yang mandiri.

2. Sumbangan Praktis

• Sumbangan praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan dalam memanfaatkan manajemen berbasis sekolah untuk revitalisasi Ruang Pendidik INS Kayutanam dalam pengembangan siswa yang mandiri dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bagi pengurus Badan Wakaf Ruang Pendidik INS Kayutanam, Kepala Sekolah, dan Guru untuk revitalisasi Ruang Pendidik INS Kayutanam dengan memanfaatkan model manajemen berbasis sekolah dalam pengembangan siswa yang mandiri.
- b. Bagi peneliti sebagai perluasan wawasan dan penambahan pengetahuan dalam pemahaman tentang Ruang Pendidik INS Kayutanam serta penerapan manajemen berbasis sekolah secara profesional untuk revitalisasi lembaga persekolahan umumnya, dan Ruang Pendidik INS Kayutanam khususnya.
- c. Bagi peneliti dan praktisi pendidikan lainnya dapat dijadikan sebagai salah satu landasan dalam pengkajian dan pengembangan berbagai aspek yang berkaitan dengan revitalisasi lembaga persekolahan dan penerapan manajemen berbasis sekolah dalam rangka meningkatkan kemandirian siswa.
- d. Bagi Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Padang Pariaman dapat dijadikan sebagai salah satu masukan yang merupakan fasilitator dan dinamisator untuk menerapkan manajemen berbasis sekolah dalam rangka revitalisasi lembaga persekolahan dan pengembangan siswa yang mandiri.
- e. Bagi pengelola yayasan pendidikan dan kepala sekolah dapat dijadikan sebagai salah satu masukan untuk revitalisasi lembaga persekolahan dengan

menerapkan manajemen berbasis sekolah dalam pengembangan siswa yang mandiri.

E. ASUMSI

Asumsi penelitian tentang revitalisasi sistem pendidikan INS dengan memanfaatkan model Manajemen Berbasis Sekolah dalam pengembangan siswa yang mandiri antara lain sebagai berikut.

1. Ruang Pendidik INS Kayutanam berangkat dari pemikiran filsafat alam sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Alam bergerak dalam sistem yang tetap secara dinamis yang dialektik seimbang. Manusia sebagai substansi alam, dengan tenaga, pikiran, dan perasaannya harus mengikuti sistem alam itu. Keluar dari sistem berarti lepas dari keseimbangan.
2. Agar bangsa Indonesia dapat maju sama dengan bangsa lain, lembaga pendidikan hendaklah dapat mendidik siswa-siswanya menjadi manusia, mandiri, dinamis, aktif, kreatif dan produktif dengan etos kerja yang tinggi.
3. MBS memberikan kewenangan, kepercayaan, dan kemandirian kepada sekolah untuk mengelola dan mengembangkan sumberdaya, meningkatkan mutu, serta mempertanggungjawabkan mutu sekolah tersebut kepada orang tua siswa, masyarakat, dan pemerintah dalam bingkai kebijakan pendidikan nasional.

4. Pelaksanaan MBS memerlukan partisipasi semua komponen sekolah dan masyarakat. Manajemen sekolah harus dapat meyakinkan, bahwa masyarakat mempunyai hak dan kewajiban untuk memikirkan dan mengusahakan perencanaan, pengelolaan, evaluasi, sistem pendanaan, sarana dan prasarana sekolah secara konkrit agar partisipasi itu berjalan dengan baik.
5. MBS memerlukan rumusan visi dan misi sekolah yang jelas sebagai hasil rumusan bersama antara sekolah, masyarakat, dan orang tua siswa. Partisipasi masyarakat dan orang tua siswa akan meningkat, jika mereka dilibatkan dalam perumusan kebijakan sekolah.
6. MBS bertumpu pada sekolah dan masyarakat serta jauh dari birokrasi yang bersifat sentralistik. MBS mempunyai potensi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, pemerataan, efisiensi, dan efektivitas, serta mutu pendidikan.
7. Suasana dan lingkungan sekolah yang aman dan tertib, baik fisik maupun psikologis merupakan prasyarat utama terlaksananya suatu proses pembelajaran secara optimal. Iklim sekolah yang kondusif dapat memberikan perlindungan kepada siswa dan warga sekolah lainnya untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Ruang Pendidik INS Kayutanam yang telah ditetapkan.
8. Reformasi pemerintahan yang terjadi di Indonesia telah mengakibatkan terjadinya pergeseran penyelenggaraan pemerintahan dari sentralisasi ke

desentralisasi yang ditandai pemberian otonomi yang luas dan nyata kepada daerah kabupaten/kota serta otonomi sekolah. Pemberian otonomi ini bertujuan untuk memandirikan daerah dan sekolah serta memberdayakan masyarakat, sehingga lebih leluasa dalam mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa yang mandiri.

9. Dengan pelaksanaan otonomi daerah, masyarakat akan lebih terpacu untuk mengembangkan mutu sumber daya manusianya agar mampu bersaing. Kemampuan bersaing tersebut amat ditentukan oleh pendidikan yang bermutu. Mutu pendidikan tersebut harus memenuhi standar nasional dan internasional agar sumber daya manusia Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara lain, dan mampu menjadi tuan rumah di negara sendiri.
10. Salah satu faktor yang menyebabkan mutu pendidikan kurang mengembirakan adalah manajemen pendidikan belum dikelola secara profesional.
11. Tuntutan nasional, regional, dan global terhadap pendidikan yang mampu menghasilkan sumber daya manusia mandiri dengan pengendalian mutu terpadu, dapat dilaksanakan melalui penerapan model manajemen berbasis sekolah.
12. Salah satu upaya pengembangan manajemen pendidikan yang mampu mendukung pelaksanaan otonomi sekolah adalah manajemen berbasis sekolah yang bersifat transparan, demokratis, efisien, efektif, bermutu, dan akuntabel.

F. PENJELASAN ISTILAH

Ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan secara lebih operasional dalam penelitian ini, sehingga kesalahtafsiran dan kesalah pahaman dapat dihindari. Berbagai istilah dalam penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Revitalisasi

Berdasarkan *Oxford Advanced Learner's Dictionary* (1989:1085) *revitalize put new life into*. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (1997:840) revitalisasi berarti proses, cara, perbuatan memvitalkan (menjadikan vital). Selanjutnya, menurut Al-Ghazali yang diterjemahkan oleh Kurniawan (1998:5) mengemukakan tentang *Ihya Ulumuddin*, artinya menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Sedangkan yang dimaksudkan dengan revitalisasi dalam penelitian ini adalah menghidupkan kembali atau proses memvitalkan nilai-nilai dan komponen-komponen yang terdapat dalam Ruang Pendidik INS Kayutanam, sehingga INS Kayutanam dapat melaksanakan proses belajar dan mengajar yang efektif dan efisien untuk menghasilkan siswa yang mandiri.

2. Sistem Pendidikan INS Kayutanam

INS adalah singkatan dari **Institut Nasional Syafei**. Pengertian Ruang Pendidik INS Kayutanam dikemukakan oleh Navis (1996:60) sebagai berikut: (1) ruang adalah suatu tempat yang luas tiada terbatas, dan (2) pendidik artinya belajar dan mengajar. Untuk itu, ruang pendidik ialah suatu tempat yang luas digunakan untuk pelaksanaan proses belajar dan mengajar. Oleh karena itu, pelaksanaan proses pembelajaran bukan hanya terbatas dengan adanya guru

dan siswa, tetapi siswa dapat belajar dari pengalaman dan kehadiran alam sekitarnya. *Alam terkembang jadi guru.*

Ruang Pendidik INS Kayutanam berangkat dari pemikiran filsafat alam sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Metoda mengajar yang dipakai adalah metoda aktif-kreatif, di mana siswa sebagai subyek dan guru sebagai obyek. Program pendidikan yang dilaksanakan pada Ruang Pendidik INS Kayutanam terdiri atas: (1) pendidikan akademik, (2) pendidikan keterampilan, (3) pendidikan kerohanian, dan (4) pendidikan kesiswaan. (Navis, 1996: 106).

3. Manajemen Berbasis Sekolah

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah mengalihkan pengambilan keputusan dari pusat/kanwil/kandep ke level sekolah (Samani, 1999:6). Untuk itu, sekolah diharapkan lebih mandiri dan mampu menentukan arah pengembangan yang sesuai dengan kondisi dan tuntutan lingkungan masyarakatnya. Selanjutnya Mohrman and Wohlsetter, Calwell and Spinks (dalam Sa'ud (2000:3) mengemukakan MBS adalah sistem pengelolaan persekolahan yang memberikan kewenangan dan kekuasaan kepada sekolah untuk mengatur kehidupan sekolah yang sesuai dengan potensi, tuntutan, dan kebutuhan sekolah yang bersangkutan. Dalam MBS, sekolah merupakan institusi yang memiliki *full authority and responsibility* untuk secara mandiri menetapkan program pendidikan dan berbagai kebijakan sekolah yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

MBS merupakan salah satu alternatif program desentralisasi pendidikan. Prinsip MBS adalah (1) pendelegasian kewenangan yang bertumpu pada sekolah dan masyarakat serta menjauhi birokrasi yang bersifat sentralistis, (2) adanya otonomi yang luas di tingkat sekolah dan partisipasi masyarakat yang tinggi, (3) sekolah memiliki keleluasaan mengelola sumber daya dengan mengaplikasikannya yang sesuai dengan kebutuhan serta sekolah tanggap terhadap kebutuhan setempat, dan (4) masyarakat dituntut partisipasi aktifnya, agar mereka lebih memahami pendidikan, membantu, dan mengontrol pengelolaan sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan.

4. Kemandirian

Konsep kemandirian dikemukakan oleh Kartadinata (1988:49 dan 50) bahwa kemandirian merupakan adaptasi dari konsep *autonomy*. Beberapa istilah yang dikemukakan oleh para ahli yang berkaitan dengan kemandirian adalah: (1) *self-determination* (Durkheim), (2) *autonomous morality* (Piaget), (3) *ego-integrity* (Erikson), (4) *the creative-self* (Adler), (5) *self-actualization* (Maslow), dan (6) *self-esteem and self-control* (Sullivan).

Selanjutnya Kantor Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan hidup (dalam Widodo, 1990:3) merumuskan kemandirian sebagai berikut: (1) bebas, (2) progresif dan ulet, (3) berinisiatif, (4) pengendalian diri, dan (5) kemantapan diri. Dalam penelitian ini, kemandirian siswa yang dideskripsikan dan dianalisis sesuai dengan konsep tersebut di atas.

E. KERANGKA BERPIKIR PENELITIAN (PARADIGMA PENELITIAN)

Kerangka berpikir penelitian (paradigma penelitian) adalah merupakan suatu model yang menjadi rujukan bagi peneliti dalam pelaksanaan penelitiannya. Pengertian paradigma dikemukakan oleh Makagiansar, (dalam Surya, 1997:18) bahwa paradigma diartikan sebagai suatu kesatuan persepsi, gagasan, konsep, dan nilai-nilai yang menentukan pola pikir dan perilaku manusia dalam waktu dan tempat tertentu. Sedangkan pengertian model dikemukakan oleh Muhadjir (1996:216) bahwa model ini membangun suatu konseptualisasi lebih jauh lagi, yaitu berangkat dari proposisi universal untuk melandasi semua konstruksi pemikiran lebih lanjut. Selanjutnya Bogdan & Biklen, (dalam Somantri (1999:20) menyatakan bahwa paradigma adalah sejumlah asumsi, konsep, atau proposisi-proposisi yang diyakini kebenarannya, yang mengarahkan cara berpikir dan penelitian ini. Berdasarkan berbagai konsep tersebut di atas, maka paradigma penelitian tentang revitalisasi Ruang Pendidik INS Kayutanam dengan memanfaatkan model manajemen berbasis sekolah dalam pengembangan siswa yang mandiri pada Ruang Pendidik INS Kayutanam di Sumatera Barat sebagai berikut.

